

STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Yustinus Ridarto¹, Ridho Afwan²

^{1,2}Pascasarjana, Universitas Islam Riau

Correspondent Email: Dartoksap93@gmail.com¹ ridhoafwan@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze the strategies of the Riau Provincial Government in achieving the Sustainable Development Goals, particularly Goal 1: No Poverty. Although Riau is endowed with significant natural resources, poverty remains a persistent issue in several districts, especially in rural and coastal areas that experience unequal development. This condition demonstrates the need for a comprehensive, integrated, and sustainable poverty alleviation strategy at the provincial level. The research employs a qualitative descriptive method through the analysis of policy documents, secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS), and relevant literature on SDG implementation at the local government level. The findings indicate that the Riau Provincial Government's strategy consists of four main components: (1) environmental scanning to identify socio-economic conditions and root causes of poverty; (2) strategy formulation through the integration of poverty reduction programs into the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and the Regional Action Plan for SDGs (RAD SDGs); (3) strategy implementation through economic empowerment initiatives, improved access to basic services, and strengthened collaboration among government institutions, private sectors, and community groups; and (4) evaluation and control through monitoring of poverty indicators and program performance. The study reveals several supporting factors, including political commitment, regulatory frameworks, and stakeholder involvement, while inhibiting factors include regional disparities, limited integrated data, and economic dependence on extractive industries. Therefore, this study emphasizes the importance of strengthening governance, enhancing cross-sectoral synergy, and promoting policy innovation to ensure sustainable and inclusive poverty reduction efforts in Riau Province.

Keywords: Local Government Strategy, SDGs, Poverty Alleviation, Sustainable Development, Riau Province.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan pertama yaitu pengentasan kemiskinan. Meskipun Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam yang besar, permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir yang mengalami ketimpangan pembangunan dan keterbatasan akses ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, data sekunder BPS, serta literatur relevan mengenai implementasi SDGs di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Provinsi Riau meliputi empat aspek pokok: (1) pemindaian lingkungan untuk mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi dan akar penyebab kemiskinan; (2) perumusan strategi melalui integrasi program pengentasan kemiskinan ke dalam RPJMD dan RAD SDGs; (3) implementasi strategi melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; serta (4) evaluasi dan pengendalian melalui pemantauan capaian indikator kemiskinan dan kualitas pelaksanaan program. Penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung strategi pemerintah meliputi komitmen politik, regulasi pendukung, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Sementara itu, faktor penghambat mencakup disparitas wilayah, keterbatasan data terintegrasi, dan ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola, sinergi lintas sektor, dan inovasi kebijakan agar pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah, SDGs, Kemiskinan, Pembangunan Berkelanjutan, Riau.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Provinsi Riau, memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pembangunan dan memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Peran ini menjadi semakin krusial mengingat pemerintah daerah memiliki kewenangan otonom dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Provinsi Riau, yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah seperti minyak, gas, dan komoditas perkebunan, diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Namun demikian, persoalan kemiskinan masih menjadi isu yang terus berulang di beberapa wilayah, bahkan di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam sekalipun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berlangsung selama ini belum sepenuhnya berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022-2024, bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional dalam bentuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta

pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke kegenarasi berikutnya, melalui sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau, terutama wilayah pedalaman dan pesisir, tingkat kemiskinan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh beragam faktor, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan lapangan pekerjaan, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Riau memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan selaras dengan prinsip-prinsip SDGs, khususnya tujuan pertama yaitu “Tanpa Kemiskinan” (*No Poverty*). Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan melalui strategi pembangunan jangka panjang.

Sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Riau menyusun dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah mengintegrasikan agenda SDGs melalui Rencana Aksi Daerah (RAD TPB/SDGs). Integrasi ini diharapkan mampu mengarahkan setiap kebijakan dan program pembangunan agar turut berkontribusi terhadap percepatan pengentasan kemiskinan. Namun demikian,

efektivitas pelaksanaan kebijakan ini masih perlu ditinjau secara menyeluruh, mengingat tidak semua kabupaten/kota menunjukkan capaian yang sama. Perbedaan kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan antarwilayah membuat implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan strategis yang lebih adaptif. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Riau memiliki peran untuk mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, hingga masyarakat sipil.

Kemiskinan di Riau juga memiliki sifat multidimensi, sehingga penanganannya harus mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Pendekatan administrasi publik menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa perumusan kebijakan, implementasi program, dan evaluasi kinerja berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi. Oleh karena itu, strategi yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Riau harus mempertimbangkan sinergi antarinstansi agar penanggulangan kemiskinan menjadi lebih terarah dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Kondisi ini menegaskan kembali peran strategis pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Administrasi merupakan sistem dari suatu kegiatan formal yang dilakukan secara teratur, sistematis dan saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara sub sistem atau bagian dengan bagian yang lain saling berkaitan dan saling menentukan Nurman Dkk (2023;21).

Urgensi penelitian ini muncul karena pentingnya kajian mendalam mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan TPB/SDGs, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun Riau merupakan daerah dengan potensi ekonomi besar, kesenjangan sosial dan ekonomi masih terjadi di berbagai wilayah. Banyak masyarakat di daerah terpencil dan pesisir masih mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, penelitian mengenai strategi pemerintah provinsi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kebijakan di tingkat provinsi dapat diarahkan secara lebih efektif.

Untuk memahami kondisi kemiskinan di Provinsi Riau secara lebih komprehensif, diperlukan gambaran empiris mengenai tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di setiap kabupaten/kota. Meskipun Riau dikenal sebagai provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, distribusi kesejahteraan belum merata di seluruh wilayah. Ada daerah yang menunjukkan perbaikan signifikan, namun terdapat pula wilayah yang menghadapi tingkat kerentanan ekonomi lebih tinggi, terutama daerah pesisir, pedalaman, dan wilayah yang bergantung pada sektor primer.

Indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) menjadi ukuran

penting untuk melihat bukan hanya berapa banyak penduduk miskin, tetapi juga seberapa jauh kesenjangan pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan serta tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. Melalui indikator ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah prioritas, merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan memastikan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan

selaras dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu *Tanpa Kemiskinan*.

Berikut disajikan data Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan Provinsi Riau tahun 2025 berdasarkan kabupaten/kota sebagai dasar analisis untuk mengukur disparitas antarwilayah dan menilai urgensi intervensi kebijakan di daerah tertentu.

Tabel I
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Kearifan Kemiskinan (P2)
Di Provinsi Riau Tahun 2025 Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota Provinsi Riau	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota, 2025	Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota, 2025
1	Kuantan Singingi	0,74	0,16
2	Indragiri Hulu	0,44	0,09
3	Indragiri Hilir	0,35	0,06
4	Pelalawan	0,86	0,18
5	Siak	0,40	0,06
6	Kampar	0,94	0,19
7	Rokan Hulu	0,84	0,18
8	Bengkalis	0,64	0,11
9	Rokan Hilir	1,16	0,36
10	Kepulauan Meranti	3,05	0,70
11	Pekanbaru	0,34	0,08
12	Dumai	0,20	0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, terlihat adanya variasi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di antara kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dua indikator utama yang dianalisis adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2), yang memberikan gambaran bukan hanya berapa banyak penduduk miskin, tetapi seberapa parah tingkat kemiskinan. Dari sisi administrasi publik, variasi ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek:

1. Kapasitas Pemerintah Daerah (*Governance Capacity*), Daerah dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, seperti Pekanbaru dan Dumai, mampu mengelola program penanggulangan kemiskinan secara efektif melalui sinergi antarinstansi, transparansi anggaran, dan kolaborasi lintas sektor. Sebaliknya, daerah seperti Kepulauan Meranti masih menghadapi kendala administratif seperti lemahnya koordinasi birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia

aparatur, serta rendahnya efektivitas implementasi kebijakan sosial.

2. Efektivitas Kebijakan Publik (*Public Policy Implementation*), Perbedaan angka P1 dan P2 menunjukkan perbedaan efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan. Kabupaten dengan indeks tinggi mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), program UMKM, dan program peningkatan keterampilan kerja yang mungkin belum tepat sasaran.
3. Desentralisasi dan Responsivitas Pemerintah Lokal, Dalam kerangka otonomi daerah, kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk merancang program berbasis potensi lokal menjadi faktor kunci. Daerah dengan nilai P1 dan P2 tinggi cenderung memiliki rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat miskin, terutama di wilayah terpencil atau perdesaan.
4. Aspek Partisipasi Masyarakat, Kemiskinan yang mendalam sering kali juga mencerminkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pendekatan partisipatif melalui forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) agar kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dari sisi akademis, penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam memahami dinamika implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian

terdahulu terkait SDGs dan memberikan rekomendasi baru bagi pengembangan strategi pengentasan kemiskinan. Untuk itu, kajian terhadap penelitian-terdahulu dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan menentukan posisi penelitian penulis dalam ranah keilmuan yang berkembang. Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SDGs telah menjadi perhatian pada berbagai tingkat pemerintahan, meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek strategis, evaluatif, dan kolaboratif.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana pemerintah provinsi merencanakan kebijakan, melaksanakan program, membangun kerja sama lintas sektor, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas strategi pemerintah daerah dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, penelitian ini bertujuan menilai efektivitas perencanaan, implementasi, serta evaluasi strategi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Tujuan lainnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki program penanggulangan kemiskinan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan?
2. Apa saja faktor pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Pengentasan Kemiskinan?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Pengentasan Kemiskinan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan Arikunto (2005:234). Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan hasil wawancara, gambar peristiwa dan hasil pengamatan berupa catatan peristiwa dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi, informasi diperoleh dari informan dan dari peneliti itu sendiri. Hamim (2022:175). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Lokasi Penelitian, Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, dengan fokus utama pada kebijakan dan strategi pemerintah provinsi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya tujuan pertama, penanggulangan kemiskinan (Tanpa Kemiskinan). Provinsi Riau dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki beberapa karakteristik strategis yang relevan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun Riau dikenal sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan perkebunan kelapa sawit, angka kemiskinan di beberapa kabupaten/kota masih tinggi. Hal ini terutama terlihat di wilayah pesisir dan pedalaman, yang menunjukkan adanya disparitas kesejahteraan yang signifikan antarwilayah. Pemerintah Provinsi Riau telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melaksanakan TPB dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berbagai program prioritas.

Sumber data meliputi:

Data primer: diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah provinsi, pegawai dinas sosial, perencanaan pembangunan daerah, dan tokoh masyarakat.

Data sekunder: berasal dari dokumen resmi pemerintah, laporan pembangunan daerah, data Badan Pusat Statistik (BPS), dan

literatur terkait TPB dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Miles dan Huberman, 1992).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan beberapa strategi penanggulangan kemiskinan yang selaras dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, antara lain:

Penguatan kelembagaan dan tata kelola. Pemerintah memperkuat koordinasi antarlembaga melalui forum pembangunan daerah dan mengintegrasikan program lintas sektor.

Optimalisasi program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program seperti bantuan sosial tunai, bantuan produktif untuk UMKM, dan pelatihan keterampilan kerja menjadi fokus utama dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan melalui program CSR dan dengan lembaga sosial untuk memberdayakan masyarakat pedesaan.

Pendekatan berbasis data dan partisipatif. Pemerintah telah mulai menggunakan sistem data kemiskinan daerah terpadu dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan program. Untuk memahami kondisi kemiskinan di Provinsi Riau secara lebih komprehensif, diperlukan gambaran mengenai perkembangan tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Data berikut disajikan untuk menunjukkan tren jumlah penduduk miskin serta persentase kemiskinan di Provinsi Riau berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui data ini, dapat dilihat dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat dan sejauh mana program pemerintah daerah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau, tidak cukup hanya melihat persentase penduduk miskin, tetapi juga perlu memperhatikan dimensi lain seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur rata-rata kebocoran pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. Kedua indikator ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai seberapa parah kondisi kemiskinan yang terjadi di suatu daerah.

Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Riau bersifat struktural dan terdistribusi tidak merata antarwilayah. Pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi administrasi publik melalui:

1. Perencanaan pembangunan berbasis data (*evidence-based planning*);
2. Peningkatan koordinasi antarinstansi penanggulangan kemiskinan;
3. Pengawasan dan evaluasi program sosial secara berkelanjutan;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Menurut Mardatillah (2021;32) Manajemen strategi memiliki sejumlah tahapan yang saling memiliki interaksi dan timbal balik. Sejumlah tahapan-tahapan berproses dengan saling berkaitan dan berurutan. Proses tahapan adalah sebagai berikut : Pemindaian Lingkungan (*Environmental Strategy*), Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*), Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*), Evaluasi dan Kontrol (*Evaluation and Control*).

1. Pemindaian Lingkungan (*Environmental Scanning*), Pada tahap ini, Pemerintah Provinsi Riau melakukan identifikasi dan analisis terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, masih terdapat ketimpangan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman seperti Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir yang memiliki indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tinggi. Selain itu, faktor lain seperti rendahnya akses pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, serta ketergantungan ekonomi terhadap sektor primer menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Pemindaian ini penting untuk memastikan bahwa setiap

strategi yang dirancang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing.

2. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*), Tahap ini dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan program strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-SDGs). Pemerintah Provinsi Riau berupaya mengintegrasikan tujuan SDGs, khususnya tujuan pertama yaitu *Tanpa Kemiskinan (No Poverty)*, ke dalam prioritas pembangunan daerah. Strategi yang dirumuskan meliputi penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal. Namun, dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor dan antarlevel pemerintahan masih perlu diperkuat agar perumusan strategi benar-benar sinkron dan efektif.
3. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*), Implementasi strategi dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah seperti bantuan sosial produktif, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, pelatihan keterampilan kerja, serta peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih

menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Oleh karena itu, implementasi strategi perlu diimbangi dengan mekanisme koordinasi dan monitoring yang lebih terstruktur.

4. Evaluasi dan Kontrol (*Evaluation and Control*), Tahap ini bertujuan untuk menilai sejauh mana strategi dan program pengentasan kemiskinan yang diterapkan telah mencapai hasil yang diharapkan. Pemerintah Provinsi Riau menggunakan data statistik, indikator SDGs, dan laporan kinerja perangkat daerah sebagai alat evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perbaikan di beberapa wilayah perkotaan seperti Pekanbaru dan Dumai, namun tantangan masih besar di wilayah pesisir dan pedalaman. Sistem kontrol saat ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis hasil (*outcome-based evaluation*). Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem evaluasi berbasis data yang terintegrasi agar kebijakan pengentasan kemiskinan dapat disesuaikan secara adaptif dan berkelanjutan.

Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Pengentasan Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan pertama Tanpa Kemiskinan,

dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan, koordinasi lintas sektor, dan integrasi program pembangunan. Strategi tersebut dapat dilihat melalui beberapa langkah utama:

1. Integrasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah, Pemerintah Provinsi Riau telah mengintegrasikan target SDGs ke dalam RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan Rencana Aksi Daerah SDGs (RAD-SDGs). Integrasi ini memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas lintas sektor, tidak hanya difokuskan pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses layanan dasar.
2. Penguatan koordinasi lintas sector, Pemerintah provinsi membentuk forum koordinasi antar-OPD dan bekerja sama dengan Bappeda sebagai koordinator perencanaan. Koordinasi diperlukan untuk menyinergikan program pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, UMKM, dan infrastruktur agar terarah pada pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Fokus pada peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi, Program seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal UMKM, pengembangan desa produktif, dan penguatan koperasi menjadi strategi utama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat rentan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan langsung.
4. Penguatan basis data kemiskinan, Pemerintah Provinsi Riau meningkatkan validitas data melalui sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),

data BPS, dan data desa/kelurahan. Peningkatan kualitas data digunakan untuk menargetkan intervensi program secara lebih tepat sasaran.

5. Pembangunan infrastruktur dasar dan akses layanan publik, Strategi ini dilakukan dengan memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan transportasi untuk menurunkan tingkat kerentanan masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan pesisir.

Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam Pengentasan Kemiskinan

Faktor Pendukung

1. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap SDGs Adanya komitmen politik dan regulasi daerah (RPJMD, RAD SDGs) memperkuat arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.
2. Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi Sektor perkebunan, perikanan, industri, dan perdagangan menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal.
3. Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Bantuan keuangan daerah, program pusat seperti PKH, BPNT, BLT, dan Dana Desa turut mendukung strategi pengentasan kemiskinan.
4. Kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga nonpemerintah CSR perusahaan, LSM, dan organisasi masyarakat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Kesenjangan, ketimpangan, antarwilayah yang tinggi Kawasan pedesaan dan pesisir masih tertinggal dibandingkan perkotaan, sehingga memerlukan intervensi lebih besar.
2. Kualitas SDM yang masih rendah Tingkat pendidikan, keterampilan kerja, dan daya saing tenaga kerja masih menjadi kendala dalam pengurangan kemiskinan.
3. Ketergantungan sebagian masyarakat pada sektor informal Pendapatan masyarakat tidak stabil sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan krisis.
4. Keterbatasan koordinasi lintas sektor Meskipun sudah ada forum koordinasi, implementasi di lapangan masih menunjukkan ego sektoral antar-OPD.
5. Ketidakakuratan data kemiskinan Perbedaan data DTKS, BPS, dan pemerintah desa menghambat ketepatan sasaran program.

Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Pengentasan Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah provinsi bersifat komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan. Upaya tersebut meliputi:

1. Penguatan kebijakan dan regulasi, Pemerintah Provinsi Riau menyusun kebijakan berbasis SDGs melalui RAD-SDGs, penguatan indikator RPJMD, dan penyelarasan Renstra OPD dengan target pengentasan kemiskinan.

2. Peningkatan program pemberdayaan ekonomi Melalui pelatihan vokasional, bantuan modal UMKM, pengembangan industri kreatif, dan peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha kecil.
3. Penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran Upaya dilakukan melalui pembaruan data kemiskinan, digitalisasi layanan sosial, dan integrasi program perlindungan sosial.
4. Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal Pemerintah provinsi memperluas pembangunan jalan provinsi, jaringan air bersih, fasilitas kesehatan, sekolah, serta sarana energi listrik untuk menurunkan kerentanan masyarakat miskin.
5. Penguatan kolaborasi multi-pihak Pemerintah provinsi bekerja sama dengan perguruan tinggi, sektor swasta melalui program CSR, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk mendukung pencapaian SDGs.
6. Monitoring dan evaluasi pencapaian SDGs Melalui sistem pelaporan berkala yang dikoordinasikan Bappeda, pemerintah mengevaluasi capaian indikator kemiskinan dan memperbaiki kebijakan berdasarkan rekomendasi evaluasi.

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagaimana sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah menegaskan bahwa kaum fakir dan miskin merupakan kelompok yang harus mendapatkan perlindungan, penguatan ekonomi, dan pemberdayaan. Selain itu, Islam juga melarang pembiaran terhadap kemiskinan dan kesenjangan sosial

sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ma'un ayat 1–3. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa seorang pemimpin adalah pengurus rakyat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan (HR. Tirmidzi). Berdasarkan hal itu, strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam pengentasan kemiskinan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan yang ditegaskan dalam ajaran Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan telah melalui seluruh tahapan manajemen strategi. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan sistem evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

1. Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan SDGs untuk pengentasan kemiskinan Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan strategi pengentasan kemiskinan melalui empat tahapan strategi manajemen: Pemindaian lingkungan dilakukan dengan menggambarkan tingkat kemiskinan, kedalaman dan kemiskinan antar sektor kabupaten/kota, serta analisis-sektor penyebab kemiskinan. Perumusan strategi difokuskan pada integrasi program SDGs ke dalam RPJMD, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, dan penentuan prioritas program seperti peningkatan ekonomi produktif,

peningkatan akses layanan dasar, serta perluasan perlindungan sosial. Implementasi strategi dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, penguatan UMKM, bantuan sosial adaptif, pemberdayaan masyarakat, serta program pemberdayaan berbasis desa/kelurahan. Evaluasi dan kontrol dilakukan melalui pemantauan pencapaian indikator SDGs, pelaporan kinerja, dan evaluasi rutin untuk memastikan program berjalan sesuai target. Secara keseluruhan, strategi pemerintah mengarah pada pembangunan inklusif, namun implementasinya masih mengakibatkan kesenjangan antarwilayah.

2. Faktor pendukung dan penghambat strategi pengentasan kemiskinan

Faktor pendukung: Komitmen pemerintah daerah melalui RAD SDGs. Ketersediaan data kemiskinan yang makin akurat melalui DTKS dan data mikro. Kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Potensi sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah yang besar.

Faktor penghambat: Disparitas kemiskinan antarwilayah yang tinggi, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan. Keterbatasan koordinasi antar-OPD dalam penyatuan program. Keterbatasan infrastruktur dasar pada wilayah tertentu. Program pemberdayaan yang belum tepat sasaran atau tidak berkelanjutan. Ketergantungan sebagian masyarakat pada bantuan sosial jangka pendek.

3. Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan SDGs untuk pengentasan

kemiskinan Pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti: Meningkatkan program ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Memperkuat akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Memperluas perlindungan sosial dan bantuan sosial adaptif. Mendorong investasi dan pembukaan lapangan kerja. Mengembangkan desa binaan, desa mandiri, dan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan literasi ekonomi. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap capaian indikator SDGs. Upaya ini berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, tetapi perlu penguatan dari sisi implementasi dan pengendalian.

SARAN

1. Penguatan koordinasi lintas sektor Pemerintah Provinsi perlu memperkuat mekanisme koordinasi antar-OPD agar program pengentasan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri. Integrasi program akan mempercepat pencapaian SDGs.
2. Peningkatan akurasi data kemiskinan Data kemiskinan perlu diperbaharui secara berkala hingga tingkat desa/kelurahan agar program tepat sasaran dan kesalahan sasaran dapat diminimalisasi.
3. Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal Kabupaten/kota perlu difasilitasi untuk mengembangkan ekonomi lokal sesuai potensi unggulannya, seperti perikanan di Meranti, pertanian di Kuansing, dan pariwisata di Siak.

4. Pengurangan disparitas antarwilayah Pemerintah perlu memberi perhatian khusus kepada daerah dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan tinggi seperti Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir dengan pendekatan afirmatif.
5. Memperkuat pemberdayaan masyarakat, bukan hanya bantuan sosial Bantuan sosial harus bersifat sementara. Pemerintah perlu fokus pada pelatihan keterampilan, dukungan modal usaha, dan pendampingan ekonomi agar masyarakat mandiri.
6. Mekanisme evaluasi yang lebih ketat Monitoring dan evaluasi berkala harus dipertegas dengan indikator kinerja yang jelas untuk memastikan program SDGs berjalan efektif dan menghasilkan perubahan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2020). *Participatory planning practice in rural Indonesia: Musrenbang and localizing development*. (Journal article). (2020).
- Anggraeni, R. M., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2022). *Fiscal decentralization and its effect on poverty alleviation: A case study of Indonesia*. *Bulletin of Islamic Economics*, 1 (2), 35–48. (Open access).
- Arikunto, S. (2005). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka. Cipta.
- Dharsana, I. G. P. A., & colleagues. (2022). *Initiatives for localizing SDGs in village development and the role of village funds*. (Journal of Community Development/ Jurnal Pengabdian)
- Diana, L. (2024). *The role of the Riau provincial government in strengthening regional economy and local development toward SDGs*. (Journal of Local Policy / Indonesian regional journal, 2024).
- Hamim, Sufian dan Wiwik Suryadartiwi. (2022). *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara
- Hasan Warso Syahputra. (2021). *The Process of Integration and Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Poverty Alleviation in Riau Province*. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, 1(6), 45–58.
- Kuntjorowati, E. (2024). *Effectiveness of strengthening social protection and social security for poverty alleviation in Indonesia*. (Journal article, 2024).
- Mardatillah, Annisa. (2021). *Manajemen Strategi Berbasis Intangible Assets (Sumber Daya Tidak Berwujud)*. Pustaka Aksara: Surabaya
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nurman. (2023). *Teori Administrasi Administrative Executif*. Sleman: Deepublish

- Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022-2024
- Putra, A. A., Hasibuan, H. S., Tambunan, R. P., & Lautetu, L. M. (2024). *Integration of the Sustainable Development Goals into a regional development plan in Indonesia*. Sustainability, 16 (23),
- Randa, F., Tangke, P., & Askikarno, C. (2024). *Analysis of Sustainable Development Goals (SDGs) reporting in provincial regional governments, Indonesia*. Revista de Gestão Social e Ambiental, 18 (8)
- Rimba, A. B., Sato, I., & Endo, K. (2025, December). *Localization and its impact on achieving SDGs and transitioning to post-SDGs in Indonesia*. Environmental and Sustainability Indicators, 18, 100295
- Sakinah, H. (2024). *Achieving the SDGs through strengthening subnational government capacities: Evidence from Indonesia*. (Conference/proceedings article / regional study).
- Siburian, M. E. (2022). *The link between fiscal decentralization and poverty Evidence from Indonesia*. Journal of Asian Economics, 81,
- Ziana Helastria, Meditamar, M. O., & Asbupel, F. (2024). *Implementation of the Village Sustainable Development Goals (SDGs) Program Through Data Archiving in Nagari Tanah Bakali, Inderapura*. Journal of Community Service, 4(1), 55–67.
- .